

ANALISIS KEBIJAKAN MAKRO DI INDONESIA

Saptaningsih Sumarmi

Universitas PGRI Yogyakarta,

Jl. PGRI I Nomor 117 Sonosewu, Yogyakarta

e-mail: saptaningsih@yahoo.co.id

Abstract: Analisis Kebijakan Makro di Indonesia. *This research make an analysis about influence of macro variables look towards inflation in Indonesia. The techniques at this research is used multiple linier regression with variable independent central government personnel expenditure, money supply look towards dependent variable inflation. This result is showing that central government personnel expenditure have negative influence, and money supply have positive influence, so support previous research.*

Abstrak: Analisis Kebijakan Makro di Indonesia. Penelitian ini menganalisa pengaruh variabel-variabel ekonomi makro terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Teknik analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan variabel independen belanja pegawai pemerintah, jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai pemerintah pusat berpengaruh negatif, dan jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi di Indonesia dan mendukung hasil penelitian sebelumnya.

Kata Kunci: Belanja Pegawai Pemerintah Pusat, Jumlah Uang Beredar, Inflasi.

Pendahuluan

Pemerintah memegang peran penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu perekonomian di negara manapun, baik yang berorientasi sosial maupun berbasis kapitalis atau gabungan dari dua system ekonomi tersebut, pemerintah mempunyai peran penting di dalam ekonomi. Meskipun dalam praktiknya di banyak Negara intervensi pemerintah sangat luas, bahkan menguasai atau monopoli ekonomi seperti di China (sekarang sudah jauh berkurang dibandingkan 23 tahun silam), Korea Utara, Myanmar, dan Kuba, dimana jumlah perusahaan milik Negara (BUMN) jauh lebih banyak dari perusahaan swasta, namun pada prinsipnya tugas pemerintah di dalam ekonomi hanyalah sebagai stabilisator, fasilitator, stimulator dan regulator, sedangkan pelaku ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada swasta. Tugas pemerintah ini direalisasikan lewat kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan dengan

tujuan untuk mendorong atau menggairahkan ekonomi pada saat ekonomi sedang lesu dan mengerem laju ekonomi pada saat sedang memanas, terutama untuk mencegah inflasi yang tinggi (Tambunan, 2006).

Tugas pemerintah tersebut diatas dikatakan sebagai kebijakan makro yang dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal diarahkan pemerintah untuk stabilisasi perekonomian melalui pengendalian pengeluaran/belanja pemerintah dan dari sumber penerimaan. Sebagai salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan, kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai stabilisator ekonomi, APBN sebagai instrument kebijakan

fiskal, diupayakan dapat berfungsi secara optimal untuk meredam siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi, atau dengan kata lain bersifat kontrasiklis (*countercyclical*). Hal tersebut berarti bahwa dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah yang bersifat *autonomous*, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, dapat memberikan stimulasi kepada perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian yang tengah memanas akibat terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal dapat didayagunakan untuk berperan dalam mendinginkan roda kegiatan ekonomi, dengan menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian melalui dampak kontraksi APBN. Dengan demikian, fungsi strategis APBN, sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian nasional dapat diketahui dari dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor-sektor lainnya, seperti sektor riil, sektor moneter, dan juga sektor eksternal. Sedangkan kebijakan moneter diarahkan bagaimana mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tetap stabil. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah volatilitas yang berlebihan, serta menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Keserasian sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tersebut sangat penting untuk menciptakan suatu stabilitas di dalam ekonomi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Pada setiap awal tahun anggaran, dalam pidatonya presiden menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk satu tahun yang akan datang di depan sidang MPR/DPR. Salah satu materi penting yang disampaikan adalah besaran belanja

pegawai pemerintah dalam RAPBN, karena menyangkut hajat hidup para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Beranjak dari besaran tersebut, akan dijadikan dasar bagi peninjauan kenaikan gaji dengan besaran yang bervariasi setiap tahunnya sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS di Indonesia. Gaji PNS ini merupakan representasi dari belanja pegawai pemerintah yang tertuang didalam RAPBN.

Namun demikian, tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dengan menaikkan gajinya terkadang menjadi bumerang. Kondisi di lapangan, berita tentang kenaikan gaji pegawai baru diwacanakan saja sudah membawa dampak yang berbeda yaitu *announcement effect* dimana harga-harga barang sudah merangkak duluan sebelum kenaikan gaji diumumkan. Kenaikan harga-harga tersebut terkadang lebih besar daripada rencana kenaikan gaji pegawai.

Kenaikan harga barang-barang atau yang disebut sebagai inflasi merupakan salah satu indikator dalam ekonomi makro. Inflasi yang relatif rendah dan stabil merupakan prasyarat utama bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Untuk mencapai kondisi tersebut di tengah kuatnya tekanan inflasi yang bersumber dari berbagai faktor eksternal dan faktor internal, diperlukan kebijakan yang tepat demi terjaganya stabilitas ekonomi makro ekonomi, dan pengendalian inflasi ke depan. Koordinasi yang baik dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel. Dibutuhkan koordinasi yang komprehensif dan terpadu antara pusat dan daerah, serta antara Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut diharapkan dapat menjaga kestabilan harga domestik, yang pada akhirnya dapat mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Tetapi tingkat inflasi yang tinggi akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam perekonomian. Inflasi tinggi akan

berdampak pada pertumbuhan yang lambat dan pengangguran meningkat. Kenaikan gaji PNS yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS malah menjadikan masyarakat umum termasuk PNS tidak berdaya dikarenakan kenaikan harga barang-barang yang lebih besar dari prosentase kenaikan gajinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan makro pemerintah dari tahun 1982-2011 terhadap inflasi, dimana variabel makro dari kebijakan fiskal diambil variabel belanja pegawai pemerintah, dan variabel makro dari kebijakan moneter diambil jumlah uang beredar.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Secara eksplisit, penelitian tentang pengaruh belanja pegawai pemerintah telah dilakukan Liestyowati (2009), yang meneliti pengaruh belanja pegawai pemerintah terhadap inflasi dari tahun 1985 – 2007. Hasilnya, kenaikan belanja pegawai pemerintah berpengaruh secara negatif terhadap tingkat inflasi di Indonesia.

Sedangkan Rohman (2005), meneliti tentang analisis faktor yang mempengaruhi laju inflasi di Indonesia tahun 1979 - 2003 dengan menggunakan variabel konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Hasilnya secara bersama-sama variabel konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor secara positif mempengaruhi inflasi. Sedangkan secara individual, variabel konsumsi, investasi, ekspor berpengaruh positif terhadap inflasi, dan secara negative impor, pengeluaran pemerintah mempengaruhi inflasi.

Penelitian Sitepu (2003), tentang inflasi dan faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan variabel pengeluaran pemerintah, investasi, jumlah kredit yang disalurkan bank umum, ekspor *netto*, kurs (Rp./US\$) dan ekspektasi masyarakat. Hasilnya pengeluaran pemerintah, jumlah kredit yang disalurkan bank umum, kurs rupiah terhadap dollar, ekspor *netto*, dan

ekspektasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi. Sedangkan investtasi tidak berpengaruh terhadap inflasi.

Rahmawati (2011), melakukan penelitian tentang pengaruh JUB, Pengeluaran Pemerintah, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Inflasi di Nangro Aceh Darusalam. Hasilnya baik secara parsial maupun simultan JUB, pengeluaran pemerintah, dan suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi.

Sedangkan penelitian Devi (2006) tentang faktor yang mempengaruhi inflasi dengan menggunakan variabel JUB, PDB, dan nilai tukar. Hasilnya secara simultan JUB, PDB, dan nilai tukar mempengaruhi inflasi. Sedangkan secara parsial, nilai tukar dan JUB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap inflasi. Sedangkan PDB berpengaruh *negative* signifikan terhadap inflasi.

Putra dan Nugraha (2006), meneliti pengaruh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 1975 – 2005. Hasilnya perubahan yang terjadi pada variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi selama 7 tahun pertama dengan respon yang cenderung tidak stabil. Sedangkan perubahan yang terjadi pada variabel jumlah uang beredar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi selama 2 tahun pertama sejak terjadinya perubahan.

Subagyo dan Asmanto (2007), meneliti pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal regional terhadap stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Timur padaperiode 1995 – 2004. Hasilnya naiknya pertumbuhan PAD, pertumbuhan dana pihak ketiga, bunga memiliki pengaruh *negative* terhadap inflasi. Pengeluaran rutin pemerintah dan kredit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi di Jawa Timur.

Lestyowati (2009); meneliti tentang inflasi dengan menggunakan variabel investtasi, JUB, belanja pegawai pemerintah. Hasilnya belanja pegawai pemerintah, investasi memiliki pengaruh *negative*

signifikan terhadap inflasi. Sedangkan JUB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap inflasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis:

- H1 : Belanja Pegawai Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi di Indonesia.
- H2 : Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi di Indonesia.
- H3 : Belanja Pegawai Pemerintah, Jumlah Uang Beredar secara bersama-sama berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder *time series* dari tahun 1982 – 2011 yang bersumber dari Departemen Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Adapun data yang dimaksud adalah data inflasi, belanja pegawai pemerintah, dan Jumlah Uang Beredar (JUB). Adapun definisi operasional variabel antara lain: a) inflasi adalah tingkat perubahan harga yang dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang mencatat harga barang-barang dan jasa kebutuhan sehari-hari yang dipublikasikan oleh BPS (dalam persen); b) belanja pegawai pemerintah adalah setiap pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam APBN yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, pensiun, tunjangan beras, uang makan dan belanja pegawai lainnya pada tahun yang bersangkutan (dalam rupiah); c) jumlah uang beredar adalah jumlah semua uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang ada di masyarakat (dalam rupiah).

Analisa data dilakukan dengan metode statistik Uji *t* dan Uji *F*, dengan taraf signifikansi 5%.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Deskripsi

- a. Nilai Inflasi memiliki nilai minimum sebesar 2% yaitu pada tahun 1999. Inflasi

memiliki nilai maksimum sebesar 78%, atau menunjukkan Inflasi tertinggi pada tahun 1998. Inflasi memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 10,22%. Inflasi memiliki nilai standar deviasi sebesar 13.152 lebih besar dari mean 10,22%, namun tidak terpaut jauh sehingga menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

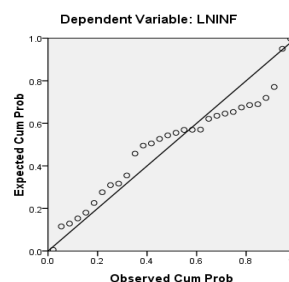
- b. Belanja Pegawai Pemerintah memiliki nilai minimum sebesar Rp 2.418.000.000 pada tahun 2000, dan memiliki nilai maksimum sebesar Rp 180.624.000.000 atau tertinggi pada tahun 2011. Belanja Pegawai Pemerintah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 43.543.890.000. Belanja Pegawai Pemerintah memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 51.474.555.000.
- c. Jumlah Uang Beredar memiliki nilai minimum sebesar Rp 7.381.000,00, atau menunjukkan JUB terendah pada tahun 1982, dan memiliki nilai maksimum sebesar Rp 28.772.210.000,00 atau menunjukkan JUB tertinggi pada tahun 2009. JUB memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 3.069.935.600, dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 6.683.556.248.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

a) Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan *normal probability plot* pada gambar dibawah, titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1. Normal Probability Plot

Selain hal diatas, suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006). Hasil uji ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		BPP	JUB
N		30	30
Normal Parameters ^a	Mean	9.9064	13.0437
	Std. Deviation	1.34738	2.35563
Most Extreme Differences	Absolute	.098	.201
	Positive	.096	.088
	Negative	-.098	-.201
Kolmogorov-Smirnov Z		.537	1.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.935	.177

a. test distribution is normal.

b. calculated from data.

Sumber data diolah, 2012

Nilai K-S untuk variabel Belanja Pegawai Pemerintah 0,537 dengan probabilitas signifikansi 0,935 yang berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atau data terdistribusi normal. Nilai K-S variabel Jumlah Uang Beredar 1,100 dengan probabilitas signifikansi 0,177 yang berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atau data terdistribusi normal.

b) Hasil Uji Multikoloniaritas

Uji multikoloniaritas dapat dilaksanakan menggunakan model regresi dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance value* diatas 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikoloniaritas (Ghozali, 2006). Hasil uji multikoloniaritas pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikoloniaritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	30.253	19.276			1.569	.129		
LNBPP	-3.975	3.202	-.407		-1.241	.022	.285	3.506
LNJUB	3.419	1.822	.612		1.877	.042	.288	3.469

a. Dependent

Variable: Inflasi

Sumber data diolah, 2012

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu Belanja Pegawai Pemerintah, dan JUB memiliki angka *Variance Inflation Factors* (VIF) di bawah 10 dengan angka *tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikoloniaritas antar variabel independen dalam model regresi.

c) Hasil Uji Autokolerasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin-Watson. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi.

Hasil uji disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Autokolerasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	.650 ^a	.302	.210	12.408	.202	2.195	3	26	.113	2.437

a. Predictors: (Constant), LNJUB, LNBPP

b. Dependent Variable: Inflasi

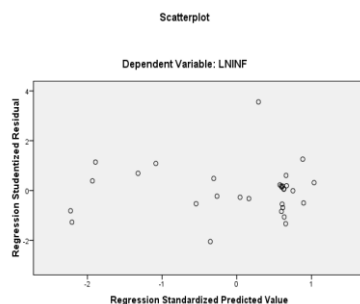
Sumber data diolah, 2012

Nilai DW sebesar 2,437, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 30 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3). Nilai DW 2,437 lebih besar dari batas atas (du) 1,71 dan kurang dari 2,28 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak Ho yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif (sesuai tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak ada autoko-relasi.

d) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas karena data *crosssection* mengandung berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2006). Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh grafik *Scatterplot* pada gambar dibawah:

Gambar 2. Scatterplot



Sumber: Data yang diolah, 2012

Berdasarkan grafik *scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Analisis Data

1. Untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung di gunakan uji t. Pengujian hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui apakah belanja pegawai pemerintah berpengaruh terhadap inflasi. Dari hasil analisis, uji nilai t ditemukan sebesar -3,975 dengan nilai p (sig 2-tailed) 0,022. Hal ini berarti belanja pegawai pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi .
2. Pengujian hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi. Dari hasil analisis, uji nilai t ditemukan sebesar 3,419 dengan nilai p (sig 2-tailed) 0,042. Hal ini berarti jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi (hipotesis 2 diterima).
3. Pengujian hipotesis 3 dilakukan untuk mengetahui apakah belanja pegawai pemerintah, jumlah uang beredar secara bersama-sama berpengaruh terhadap inflasi. Dari hasil analisis, uji nilai F ditemukan sebesar 2,195 dengan nilai p (sig 2-tailed) 0,013. Hal ini berarti belanja pegawai pemerintah, jumlah uang beredar secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap inflasi (hipotesis 3 diterima).

4. Pembahasan

a. Hubungan Belanja Pegawai Pemerintah Pusat dengan Inflasi

Hipotesis pertama menyatakan bahwa "Belanja Pegawai Pemerintah (BPP) berpengaruh positif signifikan terhadap Inflasi". Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan BPP sebesar 0,022 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa BPP berpengaruh negatif terhadap inflasi. Hal ini berarti kenaikan BPP tidak menyebabkan kenaikan inflasi. Temuan ini menunjukkan bahwa belanja pegawai pemerintah pusat hanya merupakan sebagian kecil dari total belanja/pengeluaran pemerintah dalam AP-BN dan hanya dinikmati oleh PNS, sehingga kenaikannya tidak mempengaruhi inflasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2005) dimana secara individual variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap inflasi, dan Liestyowati (2009) dimana secara individual variabel BPP berpengaruh negatif terhadap inflasi.

b. Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan Inflasi

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Jumlah Uang beredar (JUB) berpengaruh terhadap Inflasi. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan 0.042 sehingga nilai ini lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa JUB berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Kenaikan JUB akan menaikkan inflasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, dimana JUB digunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi makro untuk mengendalikan laju inflasi dengan cara menurunkan atau menaikkan JUB, dan sesuai dengan hasil temuan Devi (2006), Hamzah (2006), dan Liestyowati (2009) yang menyatakan bahwa JUB berpengaruh positif terhadap Inflasi.

c. Hubungan Belanja Pegawai Pemerintah, Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa belanja pegawai pemerintah, jumlah uang beredar berpengaruh secara bersama-sama terhadap inflasi, dan dari hasil penelitian hipotesis ini terbukti secara signifikan. Meskipun dari hasil diatas, secara parsial belanja pegawai pemerintah terbukti berpengaruh negatif terhadap inflasi namun setelah digabung dengan variabel jumlah uang beredar, terbukti mempengaruhi inflasi. Hal ini menunjukkan dengan adanya kenaikan belanja pegawai pemerintah sehingga diasumsikan kemampuan daya beli masyarakat meningkat, dan bertambahnya jumlah uang beredar menjadikan nilai mata uang mengalami penurunan menjadi pemicu terjadinya inflasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Belanja Pegawai Pemerintah Pusat berpengaruh negatif terhadap Inflasi, sedangkan jumlah uang beredar terbukti positif signifikan berpengaruh terhadap inflasi, dan secara simultan belanja pegawai pemerintah, jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi. Kenaikan Belanja Pegawai Pemerintah Pusat tidak mengakibatkan kenaikan Inflasi, dimungkinkan karena Belanja Pegawai Pemerintah Pusat hanya sebagian kecil dari belanja/pengeluaran pemerintah yang ada di AP-BN sehingga kenaikannya tidak sampai mengakibatkan kenaikan inflasi. Sedangkan Jumlah Uang yang Beredar berpengaruh positif terhadap Inflasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, dimana JUB digunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi makro untuk mengendalikan laju inflasi dengan cara menurunkan atau menaikkan JUB.

Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti hanya mengambil 2 variabel independen yaitu belanja pegawai pemerintah, jumlah uang yang beredar.
2. Periode penelitian ini dibatasi hanya dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2011.

Saran

1. Untuk mengendalikan Inflasi maka Pemerintah melalui Bank Indonesia untuk tetap menggunakan instrumen-instrumen seperti *Open market Operation, Rediscount policy, interest ceiling, moral persuasion* dalam rangka pengendalian Jumlah Uang Beredar. Instrumen ini dirasa masih cukup efektif.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan komparasi dengan menambah wilayah penelitian misalkan dengan mengambil negara tetangga untuk dibandingkan dengan hasil temuan dari studi di Indonesia agar hasilnya lebih *representative*.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain, baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Burhanudin. 2006. *Menanti Kemakmuran Negeri*. Kumpulan Esai tentang perubahan Sosial Ekonomi Indonesia. Penerbit Gramedia Pustaka Indonesia.
- Devi, Janita. 2006. *Analisis Inflasi di Indonesia*. Thesis Magister Pembangunan. USU.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbitan

Universitas Diponegoro.

Hamzah M, Zilal dan Sofilda, Eleonora (2006). “*Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pengeluaran Pemerintah dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia: Pendekatan Error Correction Model (ECM)*.” Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol, 2. No. 1. Agustus 2006.

Liestyowati, Jamila. 2009. *Analisis Pengaruh Belanja Pegawai Pemerintah, Investasi, Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Indonesia*. Thesis Magister Ekonomi Pembangunan . USU.

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia tahun 2012.

Putra, Antasari; Nugraha, Dhanie. 2006. “*Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 1975-2005*.” Jurnal Pangsa Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Edisi 12/XI/2006.

Rahmawati. 2011. “*Pengaruh JUB, Pengeluaran Pemerintah, dan Suku Bunga terhadap Tingkat Inflasi di Nanggroe Aceh Darussalam*”. Jurnal Aplikasi Manajemen Vol.9. No.1, Januari 2011.

Rohman, Fatur .2005. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia*. Skripsi. Surakarta: FE UMS.

Siamat, Dahlan.2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi kelima, 2005. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sitepu, Edy. Syahputra. 2003. *Analisis Inflasi Sumatera Utara. 1983 – 2000*. Thesis Magister Ekonomi Pembangunan. USU.

Subagyo, Priadi Asmanto .2007. *Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan*

- Kebijakan Fiskal Regional terhadap Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa Timur Periode 1995 – 2004*. Buletin Ekonomi dan Perbankan. Vol. 9 No.4, April 2007.
- Sukirno, Sadono. 1999. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Undang-undang No. 23 Tahun 1999. sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang *Bank Indonesia*.